

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Mengacu pada temuan analisis regresi linear dan uraian pembahasan yang sudah disajikan, bisa dirumuskan kesimpulan penelitian yaitu:

1. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti punya pengaruh negatif serta signifikan pada Disparitas Pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa periode 2015–2024. Koefisien negatif memberi suatu petunjuk bahwa peningkatan alokasi DAU cenderung menurunkan tingkat ketimpangan antarwilayah. Hal ini mencerminkan bahwa transfer fiskal mampu memperkuat kapasitas keuangan daerah, khususnya bagi provinsi dengan kemampuan fiskal terbatas sehingga disparitas pendapatan bisa ditekan.
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi punya pengaruh positif serta signifikan pada Disparitas Pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa periode 2015–2024. Hasil ini memberi suatu petunjuk bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan. Manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati provinsi dengan struktur ekonomi yang lebih maju sehingga tingkat disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa cenderung meningkat.
3. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa pada periode pengamatan. Ketiadaan signifikansi ini menegaskan keterbatasan kebijakan pengupahan dalam mengoreksi disparitas pendapatan agregat. Realitas struktural pasar tenaga kerja di Pulau Jawa bersifat ganda, sejalan

dengan Teori Pasar Tenaga Kerja Ganda. Masifnya porsi tenaga kerja di sektor informal membuat sebagian besar pekerja tidak terjangkau oleh regulasi standar upah. Instrumen UMP beroperasi eksklusif sebagai jaring pengaman pelindung posisi pekerja di sektor formal. Kebijakan ini terbukti belum mampu memberikan dampak pemerataan kesejahteraan bagi kelompok pekerja informal.

4. Variabel Jumlah Penduduk tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa. Besaran kuantitas demografis tidak berimplikasi langsung pada pembentukan disparitas pendapatan antarwilayah. Temuan empiris ini mematahkan asumsi pesimistis Teori Jebakan Populasi Malthus dan mengukuhkan relevansi Teori Modal Manusia. Ledakan populasi di Pulau Jawa dinetralisir oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dari rentetan investasi struktural pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tekanan demografis kehilangan daya dorong signifikannya dalam memperlebar disparitas pendapatan agregat.

## **5.2. Saran**

Mengacu pada hasil yang sudah dirangkum pada bagian kesimpulan, berikut sejumlah saran yang diajukan peneliti:

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) agar tepat sasaran dan diarahkan pada sektor-sektor produktif serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penggunaan DAU sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan

ekonomi daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah guna menekan disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa.

2. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan output, melainkan menempatkan pemerataan distribusi sebagai target yang setara. Pengembangan sektor padat karya, pemerataan investasi, serta dukungan terhadap UMKM bisa menjadi langkah untuk meminimalkan peningkatan ketimpangan akibat pertumbuhan yang tidak merata terutama pada wilayah yang mempunyai tingkat perekonomian tinggi seperti Pulau Jawa.
3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib mempertimbangkan dinamika perekonomian dan tingkat produktivitas tenaga kerja secara proporsional. Instrumen UMP terbukti memiliki jangkauan terbatas dan hanya berstatus sebagai kebijakan pendukung dalam mengoreksi ketimpangan. Pemerintah daerah harus merancang kebijakan afirmatif pelengkap di luar standar pengupahan formal. Program pemerintah wajib menyentuh perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung bagi pekerja di sektor informal. Kelompok pekerja informal ini merupakan mayoritas angkatan kerja yang luput dari skema perlindungan UMP.
4. Pemerintah daerah wajib mengelola dinamika demografi melalui akselerasi peningkatan kompetensi angkatan kerja. Peningkatan populasi berisiko menimbulkan tekanan ekonomi serius di masa mendatang bila tidak diimbangi produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Arah kebijakan

kependudukan harus difokuskan pada perluasan akses pendidikan berkualitas dan program pelatihan kerja vokasional. Penguatan investasi pada modal manusia ini akan mentransformasi besaran kuantitas penduduk menjadi aset pembangunan produktif. Kapasitas sumber daya manusia yang unggul memastikan luapan penawaran tenaga kerja dapat terserap optimal ke dalam sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

5. Peneliti berikutnya, ruang analisis bisa diperluas pada penambahan variabel yang diperkirakan ikut memengaruhi disparitas pendapatan yakni tingkat investasi, rasio ketergantungan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian juga bisa dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih spesifik seperti antar kabupaten/kota agar analisis ketimpangan regional pada masing-masing provinsi bisa digambarkan secara lebih mendalam dan terperinci terutama untuk menjawab hasil dari pengaruh upah yang tidak tersignifikansi sebelumnya dari UMP dan bisa dispesifikasi melalui UMK.